

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pendapatan dari Sektor Parkir Hanya Rp700 Juta

Entitas / Cakupan : Kabupaten Karawang

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.7

Edisi : Senin, 30 April 2018

Pendapatan dari Sektor Parkir Hanya Rp 700 Juta

KARAWANG, (PR).-

Potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Karawang dari sektor perparkiran diduga bocor hingga puluhan miliar rupiah. Dana retribusi parkir kendaraan yang semestinya masuk ke kas daerah, hanya dinikmati 17 rekanan yang mengelola perparkiran di wilayah Kabupaten Karawang.

"Jika dilihat dari jumlah kendaraan dan panjang ruas jalan yang dipakai untuk lahan parkir, potensi PAD dari sektor perparkiran mencapai Rp 30 miliar per tahun. Kenyataannya, uang parkir yang masuk ke kas daerah hanya Rp 700 juta per tahun," ujar Kepala Dinas Perhubungan Karawang Arif Bijaksana Marguyo, Minggu (29/4/2018).

Arif mengatakan, saat ini perparkiran di ruas jalan umum dipercayakan kepada 17 mitra kerja Pemkab Karawang.

Mereka diwajibkan setor ke kas daerah dengan nilai dana yang telah ditetapkan.

Padahal, lanjut Arif, potensi pendapatan dari perparkiran itu jauh di atas kewajiban setor yang dibebankan kepada rekanan tersebut. Akibatnya, PAD dari retribusi parkir tak kunjung naik signifikan.

"Kami tidak bisa begitu saja memutuskan hubungan kerja yang telah terjalin bertahun-tahun itu. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perparkiran, kami harus mencari terobosan baru," kata Arif.

Sistem berlangganan

Arif menyebutkan, salah satu terobosan yang akan dijalankannya adalah menerapkan parkir berlangganan bagi kendaraan angkutan barang dan angkutan umum. Setiap kendaraan tersebut melau-

kukan uji kir, akan ditarik parkir berlangganan Rp 100.000 per tahun.

Kendaraan tersebut selanjutnya akan diberi stiker tanda telah membayar parkir berlangganan. Kendaraan itu tidak akan dipungut biaya parkir oleh petugas saat parkir di wilayah Karawang.

Arif mengklaim jika sistem parkir berlangganan itu sudah diterapkan, PAD dari sektor parkir bisa naik hingga Rp 3 miliar per tahun. "Tahun ini kami mulai program parkir berlangganan bagi kendaraan angkutan barang dan angkutan umum. Nilai parkir berlangganan akan ditentukan sesuai dengan bobot dan jenis kendaraannya, tetapi rata-rata Rp 100.000 per kendaraan per tahun," katanya.

Selain menguntungkan pemerintah daerah, Arif mengungkapkan, parkir berlangganan juga menguntungkan pe-

milik dan awak kendaraan. Sebab, jika dihitung secara cermat, parkir berlangganan jauh lebih murah daripada harus membayar parkir setiap kendaraan di suatu tempat.

"Pengelola perparkiran di jalan umum tidak boleh mengutip uang parkir dari kendaraan yang telah ditemplei stiker parkir berlangganan karena pemilik kendaraan itu sudah membayar parkir langsung kepada pemerintah daerah," katanya.

Arif mengatakan, sistem parkir berlangganan akan disosialisasikan kepada para pemilik kendaraan barang dan kendaraan umum, juga 17 rekanan pengelola perparkiran yang menjadi mitra pemerintah. Jika uji coba berlangsung mulus, sistem parkir berlangganan akan diterapkan juga pada kendaraan pribadi. **(Dodo Rihanto)*****